

Executive Summary Proyek Perubahan

Judul Proyek Perubahan	: PERCEPATAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI PROGRAM PENGELOLAAN KETATAUSAHAAN MENGGUNAKAN APLIKASI <i>e-Signature</i> DI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA
Nama Peserta	: Ricki Marojahan Mulia
Nama Diklat/Angkatan	: DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III/ ANGKATAN 42
Tahun	: 2016

Permasalahan yang terjadi sebelum dilakukannya proyek perubahan yaitu masyarakat mengharapkan agar BPTSP dapat melaksanakan tugas penerbitan izin yang tepat waktu. Namun, saat itu masih ditemukan keterlambatan izin sebesar 7,77% di BPTSP Prov. DKI Jakarta (Data diolah BPTSP, April 2016). Dampak yang muncul akibat permasalahan tersebut yaitu tandatangan Izin dapat terlambat minimal 1 (satu) hari karena mobilitas Pimpinan. Sulit untuk memastikan bahwa pimpinan setiap saat harus berada di dalam ruang kerjanya.

Penyebab dari permasalahan tersebut adalah adanya keterlambatan ini antara lain disebabkan proses penandatanganan izin masih harus dilakukan secara konvensional, dimana pejabat yang berwenang harus ada di ruang kerjanya untuk melakukan paraf maupun penandatanganan izin. Karena itu saat pejabat yang berwenang berada di luar ruang kerjanya (misalnya saat mengikuti rapat di luar kantor BPTSP), proses penandatanganan izin tidak dapat dilakukan. Selain itu juga penandatanganan izin secara konvensional membutuhkan waktu yang relatif lambat, karena pejabat yang berwenang harus membubuhkan tandatangannya secara manual berulang-ulang pada izin-izin yang akan diterbitkan.

Solusi perbaikan yang dilakukan adalah dengan adanya Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 12 tahun 2013 mengamanatkan pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi untuk memberikan ketepatan waktu, kecepatan dan kemudahan dalam penyelenggaraan PTSP. Sistem Teknologi Informasi adalah peralatan untuk menyimpan, menganalisa dan mendistribusikan informasi (Kamus Oxford, 1995). Sistem teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam program pengelolaan ketatausahaan untuk mempercepat pejabat berwenang melakukan paraf

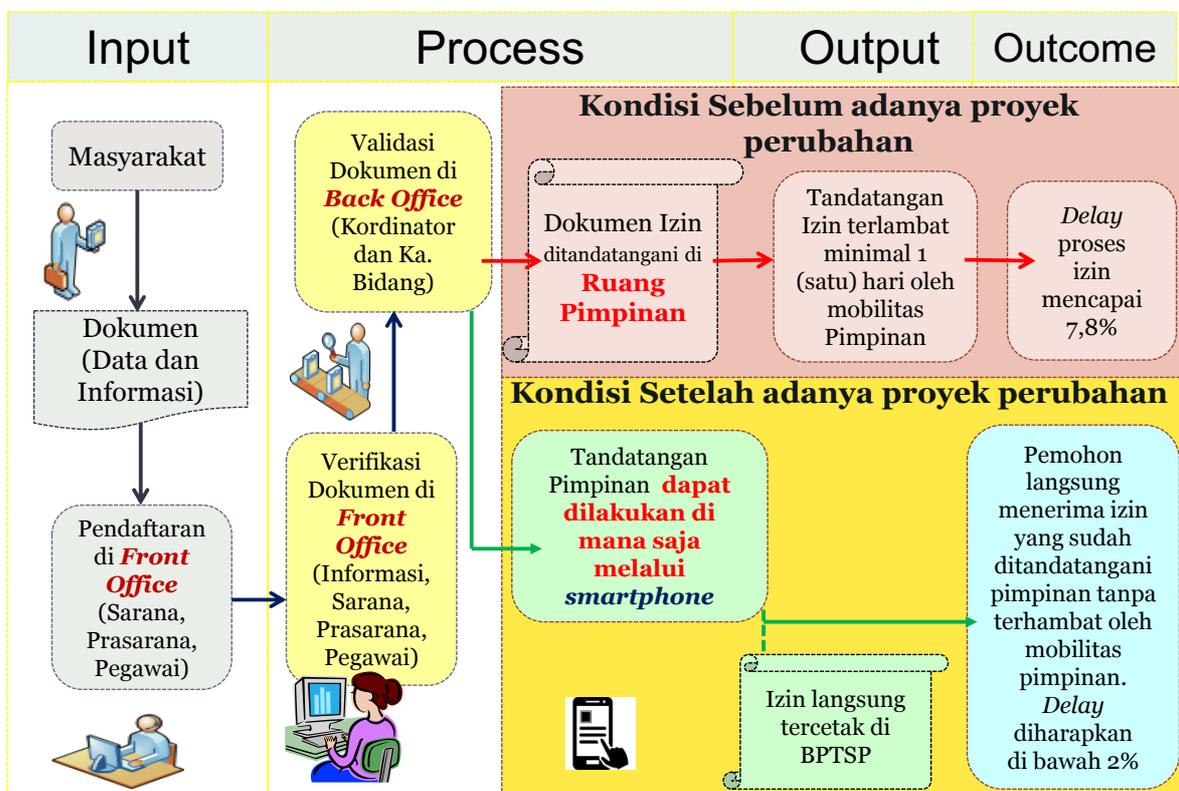
maupun penandatanganan izin. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi dalam program pengelolaan ketatausahaan untuk mempercepat pejabat berwenang melakukan paraf maupun penandatanganan izin di BPTSP Provinsi DKI Jakarta disebut aplikasi **e-signature**.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan solusi perbaikan adalah dengan Hasil monitoring perizinan menunjukkan bahwa rata-rata pengurusan Izin yang menggunakan aplikasi **e-signature**, dalam hal ini Izin Gangguan tempat usaha dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) menjadi lebih cepat seperti ditunjukkan pada Tabel berikut.

No	Jenis Izin	Rata-rata waktu memproses	
		tanpa aplikasi e-signature	dengan aplikasi e-signature
1.	Izin Gangguan tempat usaha	2400 menit	334 menit
2.	Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)	4320 menit	118 nit

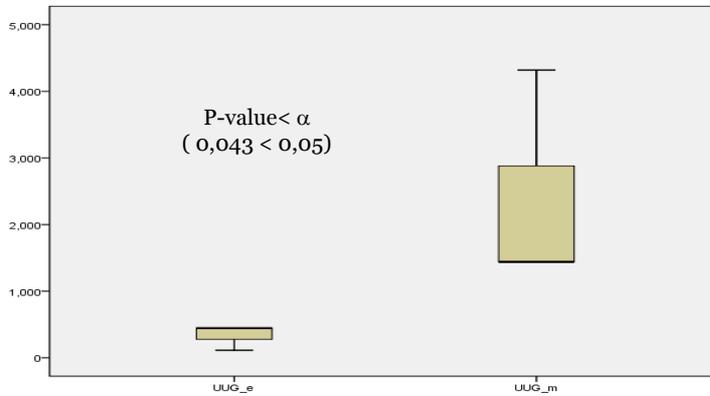
Berikut merupakan Dokumentasi sebelum dan sesudah implementasi proyek perubahan:

Bisnis Proses



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
UUG_e	3	112.00	445.00	334.0000
UUG_m	3	1440.00	4320.00	2400.0000
Valid N (listwise)	3			



Test Statistics^b

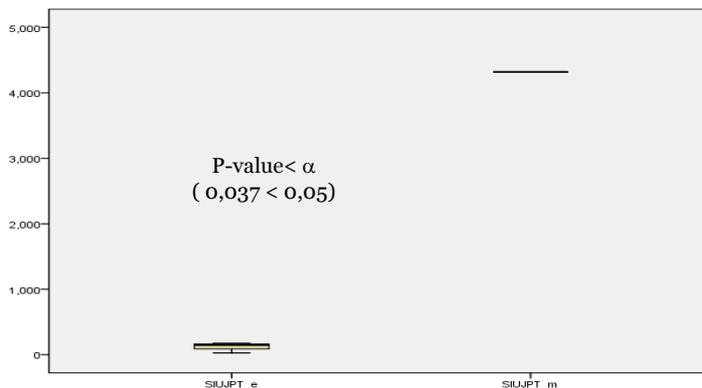
	lzin UUG
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	6.000
Z	-2.023
Asymp. Sig. (2-tailed)	.043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.100 ^a

a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Proses

Perbandingan waktu penyelesaian (dlm menit) antara UUG_e (menggunakan aplikasi e-signature) dan UUG_m (proses manual)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
SIUJPT_e	3	28.00	178.00	118.6667
SIUJPT_m	3	4320.00	4320.00	4320.0000
Valid N (listwise)	3			



Test Statistics^b

	lzin SIUJPT
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	6.000
Z	-2.087
Asymp. Sig. (2-tailed)	.037
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.100 ^a

a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Proses

Perbandingan waktu penyelesaian (dlm menit) antara SIUJPT_e (menggunakan aplikasi e-signature) dan SIUJPT_m (proses manual)

Proyek perubahan sangat dibutuhkan oleh instansi terkait dan memiliki dampak yang signifikan setelah diterapkannya proyek perubahan tersebut. Proyek Perubahan sampai dengan saat ini dan kedepannya akan dilakukan beberapa pengembangan antara lain :

1. Penggunaan e-Signature untuk kartu pengawasan pada Perizinan Jasa Transportasi Angkutan Umum;
2. Telah dilakukannya kerja sama dengan Lemsaneg dan IMTA terkait pelaksanaan e-Signature;

3. Upaya penggunaan Proyek perubahan pada rekomendasi Pertanahan;
4. Akan dilakukan pengalihan website agar mitigasi menjadi lebih aman dan terjadi.

Dalam upaya pengembangan proyek perubahan tersebut, telah dialokasikan anggaran pada UPT Sistem Informatika dan kearsipan untuk pengembangan yang lebih baik lagi. Tujuan Jangka Pendek dan menengah dari Proyek ini sudah hampir tercapai, yaitu penerapan e-signature sampai dengan Kota/Kabupaten. Dan Tujuan jangka panjang masih proses karena bertujuan penerapan *e-signature* pada seluruh Kecamatan dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan proyek perubahan ini adalah terkait dengan regulasi dan kewenangan dengan Pemerintah Pusat. Serta mekanisme dan SOP yang masih di koordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat.

Jakarta, 4 Desember 2017

ttd

Ricki Marojahan Mulia
NIP. 197010021996031001